



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :121/KPTS/VII/2026

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka I sub angka 2 sub huruf a, sub huruf b, sub huruf d, sub huruf e dan sub huruf e Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam melaksanakan tugasnya Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan Tambahan yaitu berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan dengan perhitungan pembayaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 23);
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Prestasi Kerja;
- b. Beban Kerja;
- c. Kondisi Kerja; dan
- d. Pertimbangan Objektif Lainnya.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan:

- a. tingkat produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tingkat kedisiplinan berdasarkan tingkat kehadiran sebesar 40% (empat puluh persen).

KEEMPAT : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a, wajib dilengkapi laporan penilaian kinerja bulanan yang didapat dari Aplikasi E-Kinerja diakomodir oleh Sub Bagian Pengelola Keuangan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Pengurangan terhadap Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b, dikecualikan apabila dalam keadaan:

- a. melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor pada jam kerja yang disetujui dan diketahui oleh Atasan Langsung; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil bekerja penuh tetapi tidak melakukan presensi pada saat masuk jam kerja atau pulang kerja melalui presensi elektronik, diberikan toleransi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan membuat Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, melampaui Beban Kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas jam koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEDELAPAN : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan alokasi TPP sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- KESEMBILAN : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran berdasarkan Kelas Jabatan :
- a. Jabatan Manajerial/Struktural adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi;
 - b. Jabatan Nonmanajerial/Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai;
 - c. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- KESEPULUH : Besaran persentase Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesuai dengan kemampuan keuangan daerah :

- a. Dasar perhitungan Basic TPP yang digunakan dalam penetapan besaran persentase diambil dari Basic TPP Tahun 2026;
- b. perhitungan prestasi kerja seluruh Perangkat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan paling tinggi 154% (seratus lima puluh empat persen) dari basic TPP;
 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas ditetapkan paling tinggi 127% (seratus dua puluh tujuh persen) dari basic TPP; dan
 3. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 99% (sembilan puluh sembilan persen) kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling tinggi 111% (seratus sebelas persen) dari basic TPP.
 4. Jabatan Pelaksana (kelas 5,6 dan 7) ditetapkan 123% (seratus dua puluh tiga persen) dan (kelas 1,2,3 dan 4) ditetapkan 127% (seratus dua puluh tujuh persen) dari basic TPP.
- c. perhitungan prestasi kerja Inspektorat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana ditetapkan paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari basic TPP; dan
 2. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 106% (seratus enam persen) kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling tinggi 115% (seratus lima belas persen) dari basic TPP;
- d. perhitungan beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan paling tinggi 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari basic TPP;
 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana ditetapkan paling tinggi 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari basic TPP; dan
 3. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 58% (lima puluh delapan persen) dari basic TPP kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling tinggi 68% (enam puluh delapan persen) dari basic TPP.

- e. perhitungan beban kerja (Inspektorat Daerah) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana ditetapkan paling tinggi 82% (delapan puluh dua persen) dari basic TPP;
 2. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 63% (enam puluh tiga persen) dari basic TPP kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari basic TPP;
- f. perhitungan kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas ditetapkan paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) dari basic TPP;
 2. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tinggi 37% (tiga puluh tujuh persen) dari basic TPP; dan
 3. Jabatan Pelaksana (Kelas 5, 6 dan 7) ditetapkan paling tinggi 39% (tiga puluh sembilan persen) dan Jabatan Pelaksana (Kelas 1 dan 3) ditetapkan paling tinggi 48% (empat puluh delapan persen) dari basic TPP.

KESEBELAS : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam diberikan atas tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nominal TPP Pegawai Negeri Sipil untuk setiap kelas jabatan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- b. untuk Pegawai Negeri Sipil pindahan/mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang baru ditempatkan di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mulai dibayarkan setelah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas kecuali pada jabatan struktural;

- c. pegawai yang mengalami mutasi antar jabatan dan/atau lintas jabatan manajerial dan non manajerial diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
1. sesuai jabatan dan kelas jabatan yang baru jika surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan; dan
 2. sesuai jabatan dan kelas jabatan yang lama jika surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan sejak tanggal 15 (lima belas) dan seterusnya pada bulan berkenaan.
- d. pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan yang statusnya pada instansi lain atau pegawai instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumsel tidak diberikan tambahan penghasilan kecuali yang menduduki jabatan struktural dengan ketentuan tidak dibayarkan pada instansi asal;
- e. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian/ Kepala Bidang atau Kepala Perangkat Daerah berdasarkan absensi tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang berkenaan; dan
- f. Pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil wajib melakukan presensi elektronik kecuali melampirkan surat tugas dan jadwal kegiatan.

KEDUA BELAS : Selain Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Guru SMA/SMK, SLB dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat diberikan Tambahan Penghasilan berupa natura, dengan besaran sebagai berikut:

1. Golongan IV sebesar Rp.149.400,-
2. Golongan III sebesar Rp.133.700,-
3. Golongan I dan II sebesar Rp.127.000,-

KETIGA BELAS : Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan dapat dikurangi, dengan tata cara penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA BELAS : Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai Bulan Januari 2026.
- KEENAM BELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 16/KPTS/VII/2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH BELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini. 39

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Februari 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja :

No	Kelas Jabatan	Uraian	Besaran TPP (Rp)
1	16	Pimpinan Tinggi Madya : Sekretaris Daerah	31.065.000
2	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Asisten Sekda, Kaban/Kadis/Sekwan/Kasat, Kepala Pelaksana BPBD	19.740.000
3	14	Pimpinan Tinggi Pratama : Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur RSUD Siti Fatimah/RS Ernaldi Bahar	15.028.000
4	14	Fungsional Jenjang Utama	12.000.000
5	13	Wakil Direktur : RSUD Siti Fatimah/RS Ernaldi Bahar	13.487.000
6	13	Fungsional Jenjang Utama	10.800.000
7	12	Administrator : Kepala Badan Penghubung/Sekretaris/Kabag Setda/Kacab	10.784.000
8	12	Fungsional Jenjang Madya	8.600.000
9	11	Administrator : Kabid, Kabag DPRD dan RSUD, Kepala UPTD, Kepala UPTPB Tipe A	8.338.000
10	11	Fungsional Jenjang Madya	6.700.000
11	10	Fungsional Jenjang Muda	5.800.000
12	9	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid, Kasi, Kepala UPTPB Tipe B	6.300.000
13	9	Fungsional Jenjang Muda	5.076.000
14	8	Pengawas : Kasubbag/Kasubbid dan Kasi	5.070.000
15	8	Fungsional Jenjang Pertama	4.550.000
16	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/Mahir	4.471.000
17	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	3.885.000
18	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	3.240.000
19	4	Pengemudi Ambulan	-
20	3	Pengemudi/Petugas Keamanan	1.586.000
21	2	-	-
22	1	Jabatan Pramu Kebersihan, Pramu Bakti dan Pramu Taman	1.038.000

catatan : * angka rupiah ini dibulatkan ke bawah *

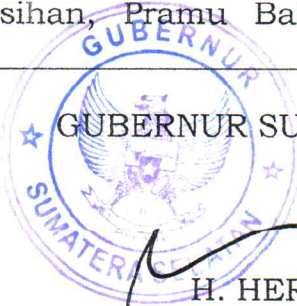
d. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Beban Kerja. 30

No	Kelas Jabatan	Uraian	Besaran TPP (Rp)
1	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Inspektur	12.500.000
2	14	Fungsional Ahli Utama	7.600.000
3	12	Administrator : Sekretaris dan Inspektur Pembantu	7.100.000
4	12	Fungsional Ahli Madya	5.400.000
5	10	Fungsional Ahli Muda	3.683.000
6	9	Pengawas : Kasubbag	4.189.000
7	8	Fungsional Ahli Pertama	2.971.000
8	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/ Mahir	2.969.000
9	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	2.580.000
10	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	2.151.000

catatan : * angka rupiah ini dibulatkan ke bawah *

e. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penghubung di Lingkungan Provinsi Sumsel berdasarkan Kriteria Kondisi Kerja.

No	Kelas Jabatan	Uraian	Besaran TPP (Rp)
1	15	Pimpinan Tinggi Pratama : Kepala Satuan	5.900.000
2	12	Administrator : Kepala Badan dan Sekretaris	3.791.000
3	11	Administrator : Kabid	2.931.000
4	11	Fungsional Ahli Madya	1.700.000
5	9	Pengawas : Kasubbag, Kasubbid dan Kasi	2.218.000
6	9	Fungsional Ahli Muda	1.600.000
7	8	Fungsional Ahli Pertama	1.500.000
8	7	Pelaksana dan Fungsional jenjang Lanjutan/ Mahir	1.400.000
9	6	Pelaksana dan Fungsional jenjang Terampil	1.200.000
10	5	Pelaksana dan Fungsional jenjang Pemula	1.000.000
11	3	Pengemudi dan Petugas Keamanan	600.000
12	1	Jabatan Pramu Kebersihan, Pramu Bakti dan Pramu Taman	400.000



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU